

MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(Analisis Terhadap Permendiknas RI. No. 24 Tahun 2007 Tentang Tandar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA)

Nona Kumala Sari

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan
Jl. Sambu No. 64 Medan
e-mail: nona27kumalasari@gmail.com

Abstract: Facilities and infrastructure certainly need a touch of management theory and practice. Both in planning, implementation, and development. Unplanned facilities and infrastructure will certainly not go according to plan. In its implementation, the facilities and infrastructure will not function effectively and efficiently, in the sense that they do not hit the target as intended. Even in terms of development facilities and infrastructure that do not consider management aspects are certainly not able to look into the future, certainly not able to look at the needs of the community in the future. In this case the managers of educational institutions need to pay serious attention and involvement of management knowledge both in the provision of facilities and infrastructure, as well as in terms of maintenance even in the development of facilities and infrastructure.

Keywords: Management, Educational Institutions, Facilities, Infrastructure.

PENDAHULUAN

Banyak faktor yang menunjang keberhasilan lembaga pendidikan Islam, salah satunya ketersediaan sarana dan prasarana. Keberadaannya menjadi fasilitator fisik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Walaupun tidak menjadi indikator utama dalam keberhasilan pendidikan, tetapi keberadaannya sering sekali dijadikan oleh banyak orang sebagai indikator keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Sarana itu sendiri artinya segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media. Sedangkan prasarana itu di artikan sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).

Lembaga pendidikan yang tidak mementingkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraannya pada dasarnya tidak melaksanakan pelayanan yang baik kepada peserta didik. Dikatakan demikian karena pada dasarnya lembaga itu berfungsi sebagai wadah dalam melayani siswa mendapatkan pengetahuan. Tentusaja wadah tersebut perlu untuk dipersiapkan, di organisasi, dan di atur sebaik-baik mungkin untuk memungkinkan terlaksana pembelajaran yang baik. Dalam kondisi tersebut siswa akan dengan mudah untuk menyerap pengetahuan dari guru-gurunya.

Dalam merencanakan, mengorganisasi, bahkan mengatur sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga pendidikan, maka dalam hal ini tidaklah menjadi tanggung jawab penuh para guru, melainkan para manajerial lah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kepala sekolah, dan pembantu kepala sekolah bidang sarana dan prasarana lah yang akan di jatuhi tanggung jawab tersebut. Karena ini bukanlah tugas semata guru maka dalam megelola sarpras tidak cukup dengan pengetahuan teoritis saja melainkan dengan penerapan manajemen yang baik dalam mengelolanya.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengelolaan manajemen lembaga pendidikan Islam yang baik itu maka perlulah kita untuk mengetahui standar khusus sarana dan prasarana dari sebuah lembaga pendidikan, yang telah di keluarkan oleh pemerintah dengan tujuan adanya penyamaan dan pemerataan sarana dan prasarana untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di di Indonesia. Standar sarana dan prasarana yang ada di Indonesia, termaktub di dalam permendiknas No. RI No 24 Tahun 2007 Tentang Tandar

Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA). Namun bagaimana dengan standar tersebut maka artikel ini selanjutnya akan membahas nya lebih lanjut.

MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

1. Pengertian Manajemen

Penjelasan mengenai pengertian manajemen ini di sari dari artikel yang ditulis oleh syamsuddin dengan judul Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. (Syamsuddin, 2017: 60). Menurutnya Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa inggris management yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* ini sendiri berasal dari Italia *Maneggio* yang diadopsi dari bahasa latin *managiare*, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2011:230). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata manajemen mempunyai pengertian sebagai penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organisasi.

Manajemen cenderung dikatakan sebagai ilmu maksudnya seseorang yang belajar manajemen tidak pasti akan menjadi seorang menejer yang baik. Adapun pengertian manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

1. Menurut Andrew F. Sikukula (Dalam Hasibun, 2009:6), mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan di hasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.
2. Menurut Terry dan Laslie (Dalam Manullang, 1985:2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud nyata, sedangkan Manula mendefinisikan manajemen pada tiga arti yaitu: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen, manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu pengetahuan.
3. Menurut Mary Paker Follet (Dalam Fatah, 1996:3) mengatakan bahwa manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (the art getting things done through people). Defenisi ini perlu mendapatkan perhatian karena berdasarkan kenyataan, manajemen mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain.
4. Menurut pandangan George R. Terry (Dalam Nawawi, 1998:39) yang mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Pengertian tersebut mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, terdapat sejumlah manusia yang ikut berperan dan harus diperankan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapatlah di ambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya memuat perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan di hasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

2. Lembaga pendidikan Islam

Penjelasan mengenai lembaga pendidikan islam ini di sari dari artikel yang sebagaimana yang di tulis oleh Ibrahim bafadhol, yang berjudul lembaga pendidikan Islam di Indonesia. (Bafadhol, 2017: 60). Beliau menyebutkan bahwa Secara bahasa, lembaga

adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. (KBBI, 808).

Kemudian Bafadhol juga menyebutkan Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut. Sebagian lagi mengartikan lembaga pendidikan sebagai lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik, menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah (madrasah) yang melaksanakan proses pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan dewasa ini sangat mutlak keberadaannya bagi kelancaran proses pendidikan, khususnya di Indonesia. Apalagi lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan konsep Islam, lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah dimana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam.

Terdapat Macam-macam Lembaga Pendidikan Islam. Jika di lihat dari aspek status hukumnya maka pendidikan Islam memiliki bentuk yakni:

a. Lembaga Pendidikan Formal

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan tinggi.

Dalam sistem pendidikan nasional juga dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai selesai tingkat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah : 1) Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. 2) Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. 3) Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. 4) Adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. 5) Memiliki kurikulum formal. 6) Adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. 7) Adanya batasan lama studi. 8) Kepada peserta yang lulus diberikan ijazah. 9) Dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi.

b. Lembaga Pendidikan Non formal

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal.

Kini, pendidikan non formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Faktor pendorong perkembangan pendidikan nonformal cukup banyak, diantaranya ialah: a) Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah. b)

Lapangan kerja, khususnya sector swasta mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan perkembangan sektor pemerintah.

Pendidikan nonformal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olah raga, dan pramuka. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dengan kata lain, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pendidikan pembedayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya.

Adapun ciri-ciri pendidikan nonformal tersebut adalah sebagai berikut : a) Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat; b) Guru adalah fasilitator yang diperlukan. c) Tidak adanya pembatasan usia. d) Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. e) Waktu pendidikan singkat dan padat materi. f) Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. g) Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.

c. Lembaga Pendidikan Informal

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama, karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak pondasi pengembangan-pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya pengembangan tersebut.

Namun pendidikan informal, khususnya pendidikan keluarga memang belum ditangani seperti pada pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga belum memahami dengan baik tentang cara mendidik anak-anak dengan benar.

Ciri-ciri pendidikan informal adalah, a) Pendidikan berlangsung terus-menerus. b) tanpa mengenal tempat dan waktu. c) Yang berperan sebagai guru adalah orangtua. Tidak adanya manajemen yang baku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah di simpulkan bahwa dari segi status hukumnya lembaga pendidikan islam itu mencakup tiga bentuk yakni pendidikan formal, non formal, dan informal, tetapi pada aartikel ini yang akan di bahas hanyalah lembaga pendidikan formal saja, pendidikan formal tersebut kemudian akan di analisis berdasarkan permendiknas mengenai sarana dan prasarana.

Kalau di lihat dari segi bentuknya lembaga pendidikan Islam memiliki tiga bentuk, yakni pesantren, sekolah dan madrasah. Ketiga-tiganya memiliki perbedaan dari segi kekhasan dan juga spesifikasi kurikulum yang dipakai. Adapun secara rinci perbedaanya sebagai berikut:

1. Pesantren

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan formal yang tertua bagi masyarakat Islam di Indonesia. Kata pesantren berasal dari kata cantrik yang merupakan kata benda konkret, kemudian berkembang menjadi kata benda abstrak yang imbuhi awalan pe- dan akhiran -an. Karena pergeseran tertentu, kata cantrik berubah menjadi kata santri. Dengan demikian, proses jadiannya, sesuai dengan tata bahasa Indonesia, fonem -ian berubah menjadi -en sehingga lahirlah kata pesantren. Sedangkan kata pondok jelas merupakan penyesuaian ucapan katafunduk dalam bahasa Arab yang berarti tempat menginap.

Penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kyai atau ulama dibantu oleh seorang atau beberapa orang ulama, dan atau para ustadz yang hidup bersama di tengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan. Di samping itu, gedung-gedung seko lah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, serta pondok-ondok sebagai tempat tinggal santri. Selama 24 jam, dari masa ke masa mereka hidup kolektif antara kyai, ustadz, santri dan para pengasuh pesantren lainnya, sebagai satu keluarga besar. Pada saat ini pondok pesantren yang dikenal masyarakat adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta sebagai pusat pengembangan Islam. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, pesantren banyak melakukan pengembangan diri untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. (Hayati, 2011: 158).

2. Madrasah

Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang berciri khas mata pelajaran agama yang mendominasi dalam kurikulumnya, namun di samping itu madrasah tetap juga mengajarkan mata pelajaran bersifat umum. Dalam status tidak ada perbedaan, artinya lulusan madrasah tetap dapat melanjut pada lembaga yang diluar madrasah. Dalam perkembangannya madrasah telah ada mulai dari tingkatan yang paling dasar namanya madrasah ibtidaiyah yang setara dengan SD, kemudian madrasah tsanawiyah yang kemudian setara dengan SMP, dan Madrasah aliyah yang setara dengan SMA, madrasah aliyah juga pada perkembangannya memiliki bentuk kejuruan, dengan demikian jika terdapat jenis sekolah dengan system kejuruan, maka madrasah pun memiliki kejuruan yang disebut dengan MAK.

3. Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas mata pelajaran umum menjadi dominasinya, namun di samping itu sekolah juga mengajarkan agama namun tidaklah sebanyak durasi di lembaga pendidikan madrasah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang cikal bakalnya sudah ada sejak masa penjajahan belanda. Itu sebabnya tak salah jika dikatakan bahwa sekolah merupakan ciptaan penjajah. Sekolah sendiri saat ini sudah bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti untuk memenuhi kebutuhan pendidikan islam maka madrasah bertransformasi kepada penambahan jam pelajaran agama diluar dari kurikulum, sekolah pun berubah menjadi sekolah islam terpadu (SIT).

Dari pemaparan di atas dapatlah di simpulan bahwa manajemen lembaga pendidikan itu, berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi dari semua aktivitas dan hal yang berkaitan dengan lembaga pendidikan. Baik menyangkut pembelajaran (akademik) maupun di luar akademik. Intinya segala sesuatu yang menunjang jalannya lembaga pendidikan maka masuk dalam lingkup manajemen pendidikan Islam.

DESKRIPSI PERMENDIKNAS RI NO 24 TAHUN 2007 TENTANG TANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Latar Belakang Munculnya Permendiknas RI No. 24 tahun 2007

Latar belakang munculnya berkaitan dengan pasal 48 peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dimana perlu adanya satu kebijakan khusus tentang bagaimana standar khusus untuk sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan. Maka sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut maka lahir lah Permendiknas RI No. 24 tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

2. Standar untuk Satuan Pendidikan

Pada lampiran permendiknas No. 24 tahun 2007 disebutkan bahwa untuk satuan pendidikan SD/MI, keriteria minimumnya tertera di bawah ini:

- a. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
- b. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.
- c. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
- d. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Sedangkan untuk Satuan Pendidikan SMP/MTs kriterian minimumnya seperti yang tertera dibawah ini:

- a. Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
- b. Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.
- c. Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
- d. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Sedangkan untuk Satuan Pendidikan SMA/MA kriteria minimumnya seperti yang tertera dibawah ini:

- a. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
- b. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.

3. Standar Untuk Bangunan Gedung

Bangunan gedung haruslah mencapai kriteria minimum yang disesuaikan dengan jumlah siswa. Untuk tingkat SD/MI Maka rasio minimumnya ialah sebagai berikut:

Tabel 1:
Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan Terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,8
3	13-18	3,2	3,4	3,5
4	19-24	3,1	3,3	3,4

Sedangkan untuk tingkat SMP/MTS maka rasio minimumnya sebagai berikut:

Tabel 2. Luas minimum lantai bangunan terhadap peserta didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	6,9	-	-
2	4-6	4,8	5,1	-
3	7-9	4,1	4,5	4,6
4	10-12	3,8	4,1	4,2
5	13-15	3,7	3,9	4,1
6	16-18	3,6	3,8	3,9
7	19-21	3,5	3,7	3,8
8	22-24	3,4	3,6	3,7

Tabel 3. Luas minimum lantai bangunan terhadap peserta didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	10,9	-	-
3	7-9	5,5	5,8	6,0
4	10-12	4,9	5,2	5,4
5	13-15	4,5	4,7	4,9
6	16-18	4,2	4,5	4,6
7	19-21	4,1	4,3	4,4
8	22-24	3,9	4,2	4,3
9	25-27	3,9	4,1	4,1

4. Standar Untuk Sarana dan Prasarana

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

Sedangkan untuk SMP/MTS sekurang-kurangnya memiliki sarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.

Sedangkan untuk SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki sarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

ANALISIS PERMENDIKNAS RI NO 24 TAHUN 2007 TENTANG TANDAR SARANA DAN PRASARANA

Permendiknas RI NO. 24 tahun 2007 tentu menjadi standar untuk kriteria layak atau tidaknya sarana dan prasarana sebuah lembaga pendidikan. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam perencanaan berdirinya sebuah lembaga pendidikan. Selain itu peraturan tersebut juga menjadi landasan dalam mengevaluasi terhadap sarana dan prasarana yang telah ada selama ini. Dengan begitu akan dapat dikategorikan apakah sarana dan prasarana tersebut dikatakan layak atau tidak layak, baik kondisinya atau butuh perbaikan dan perawatan.

Jika diperhatikan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, tentu akan semakin baik lembaga pendidikan tersebut manakalah memperhatikan dan mengikuti standar minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian dimanapun lembaga pendidikan itu berada, bila mengikuti standar tersebut maka tentu akan mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang sama.

Layaknya sarana dan prasarana pada sebuah lembaga pendidikan menjadi syarat untuk terlaksananya pendidikan yang baik pula. Para peserta didik tentu akan merasa nyaman dan aman ketika belajar pada wadah yang sesuai dengan standar kebutuhan. Sebaliknya jika sarana dan prasarana tersebut tidak layak, bahkan jauh dari standar minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Bahkan secara psikologi sarana dan prasarana yang baik tentu akan menimbulkan minat dan ketertarikan mengikuti pembelajaran.

Walaupun memang tanpa tidaklah semua sarana dan prasarana itu menjadi kebutuhan primer, dalam arti mungkin kebutuhan sekunder. Namun begitu tetaplah sarana dan prasarana menjadi kebutuhan demi terlaksananya pendidikan yang baik, dan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Tanpa adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendidikan tentu pendidikan serasa seperti terlaksana dalam lingkungan informal.

SIMPULAN

Sarana dan prasarana tentu membutuhkan sentuhan teori dan praktik manajemen. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengembangan. Sarana dan prasarana yang tidak terencana tentu tidak akan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaannya pun sarana dan prasarana tidak akan berfungsi secara efektif dan efisien, dalam arti tidak mengenai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan. Bahkan dalam hal pengembangan pun sarana dan prasarana yang tidak mempertimbangkan aspek manajemen tentu tidak mampu untuk menatap masa depan, tentu tidak mampu untuk menatap kebutuhan masyarakat di masa-masa mendatang. Dalam hal ini para pengelola lembaga pendidikan perlu untuk menaruh perhatian serius dan pelibatan ilmu manajemen baik dalam pengadaan sarana dan prasarana, maupun dalam hal perawatan bahkan dalam pengembangan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadhol, Ibrahim, *Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jurnal Edukasi Islami, Vol. 06 No.11, Januari 2017
- Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2008,
- Hasibun, Malayu S.P, *Manajemen*. Cet III, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Hayati, Fitroh, *Pesantren sebagai Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa*, Mimbar Vol. XXVII Desember 2011.
- Manullang, M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 1985.

Jurnal Hikmah, Volume 16, No. 2, Juli – Desember 2019, ISSN: 1829-8419

Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.

Syamsuddin, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Idaarah, Vol. 1 No. 1, Juni 2017.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabera. 2011.